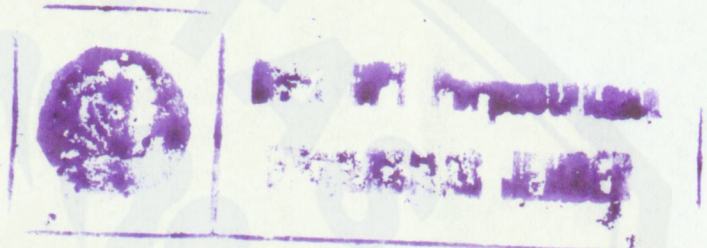


**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
PEMBANGUNAN LAPANGAN TERBANG PERINTIS  
DI KABUPATEN JEMBER DENGAN PENDEKATAN  
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember



Oleh :

Delianti

NIM: 000810101373

Ass	Periksa	338.959/82
Surat	Perbaikan	DEL
No. Induk	Tgl. 22 FEB 2004	P

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2004**

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Lapangan  
Terbang Perintis Di Kabupaten Jember Dengan  
Pendekatan *Analytic Hierarchy Process*

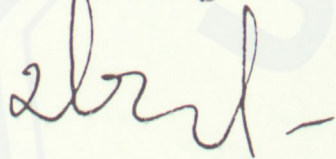
Nama Mahasiswa : Delianti

NIM : 000810101373

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan Regional

Pembimbing I



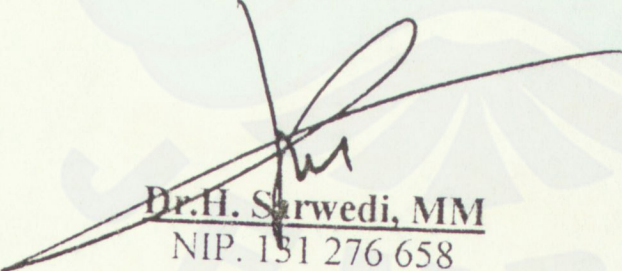
Prof. Dr. H. Harijono, SU  
NIP. 131 877 447

Pembimbing II



Dr. Rafael Purtomo M.Si  
NIP. 131 793 384

Ketua Jurusan



Dr. H. Sarwedi, MM  
NIP. 131 276 658

Tanggal Persetujuan : Desember 2004

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan Menyebut Nama Allah  
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*

*Karya Ini Kupersembahkan Kepada :*

*Ibunda Tercinta yang sangat aku Hormati*

***“MaMa Sunarwati”***

*Yang tak pernah henti mencurahkan kasih sayang,  
Memberikan bimbingan, dukungan, dorongan,  
keteladanan dan kepercayaan  
serta selalu mengiringi setiap langkahku  
dengan senyum dan doa yang tulus.  
Pengorbanan dan kesabaran mu begitu besar Ma,*

*(Thanks Mom, You're the best Mom in the World, I'm proud of You)*

*Adinda Tersayang yang sangat aku Banggakan*

***“Adik Aditya Pramono”***

*Pengertian, kebersamaan dan kasih sayanglah yang  
membuat kita mampu menghadapi semua yang terjadi*

*(Thanks Bro, You're the best Brother that I have, Do Your Best)*

*Almamater ku*

**Fakultas Ekonomi Universitas Jember**

*(Be The Best)*

MOTTO

Jangan menjanjikan yang lebih besar dari yang Anda berikan  
Lebih baik memberikan yang lebih besar dari yang Anda janjikan.  
(Gene Belley)

*Among the Expectation, the Process and the Target*

*The Process owning benefit and eternity*

*(Delianti)*

Tidak ada orang yang mengalami keberhasilan  
tanpa mengalami kesalahan, kegagalan, dan kekecewaan  
(G. Kingsley Ward)

*Never Say No Before You Try*

*and*

*Never Give Up Before You Get*

*(Delianti)*

ORA ET LA BORA

10. Kakak-kakak Ku; Mas Bagus, Mas Farid, Mas Fighan, Mas Umam, Mbak Mila, Mbak Uun, terima kasih atas doa dan motivasinya.
11. Adik-adik di Jakarta; Dik Fajar, Dik Hanief, Dik Tertia dan. canda tawa mu selalu mbak ie rindukan.
12. Keluarga di Jember Bapak Matroeki, Ibu Sri, Mas Wawan dan Dik Fitria, terima kasih atas bantuanya baik moril maupun materi.
13. *My best friends; Putri, Jevi, and Mimin, thanks for our friendship*
14. Teman-teman seperjuangan, Maz Andre, Dik Ayu, Fadil, Heny, Gito, Lusi Cempluk, Ruri, Nita.
15. *The AHP Group; Bung Fuad, Bung Ma'sum, Bung Agung, Non Indah, thanks for our Partnership*
16. Teman-teman IESP angkatan 2000 dan D3 Bahasa Inggris angkatan 2001.
17. Pak Annas, Bu Rita, Pak Kabul dan seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya.
18. Pak Agus, Pak Tatok, Maz Risky, Mbak Erna dan Seluruh Kru PT. Soka Radio Adiswara, Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya.
19. Penghuni "Green House", Ibu Hariri, Mbak unyil, Dik Wiwik, Dik Fifin, Dik Ira, dan Dik Lucky, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya.
20. Imada's members; Dede, Hikmah, Fathur, Beny, *Thanks for togetherness*

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkeinginan menambah wawasan keilmuan.

Jember, November 2004

Penulis

## RINGKASAN

### PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN LAPANGAN TERBANG PERINTIS DI KABUPATEN JEMBER DENGAN PENDEKATAN *ANALYTIC HIERARCHY PROCESS*

Oleh  
DELIANTI

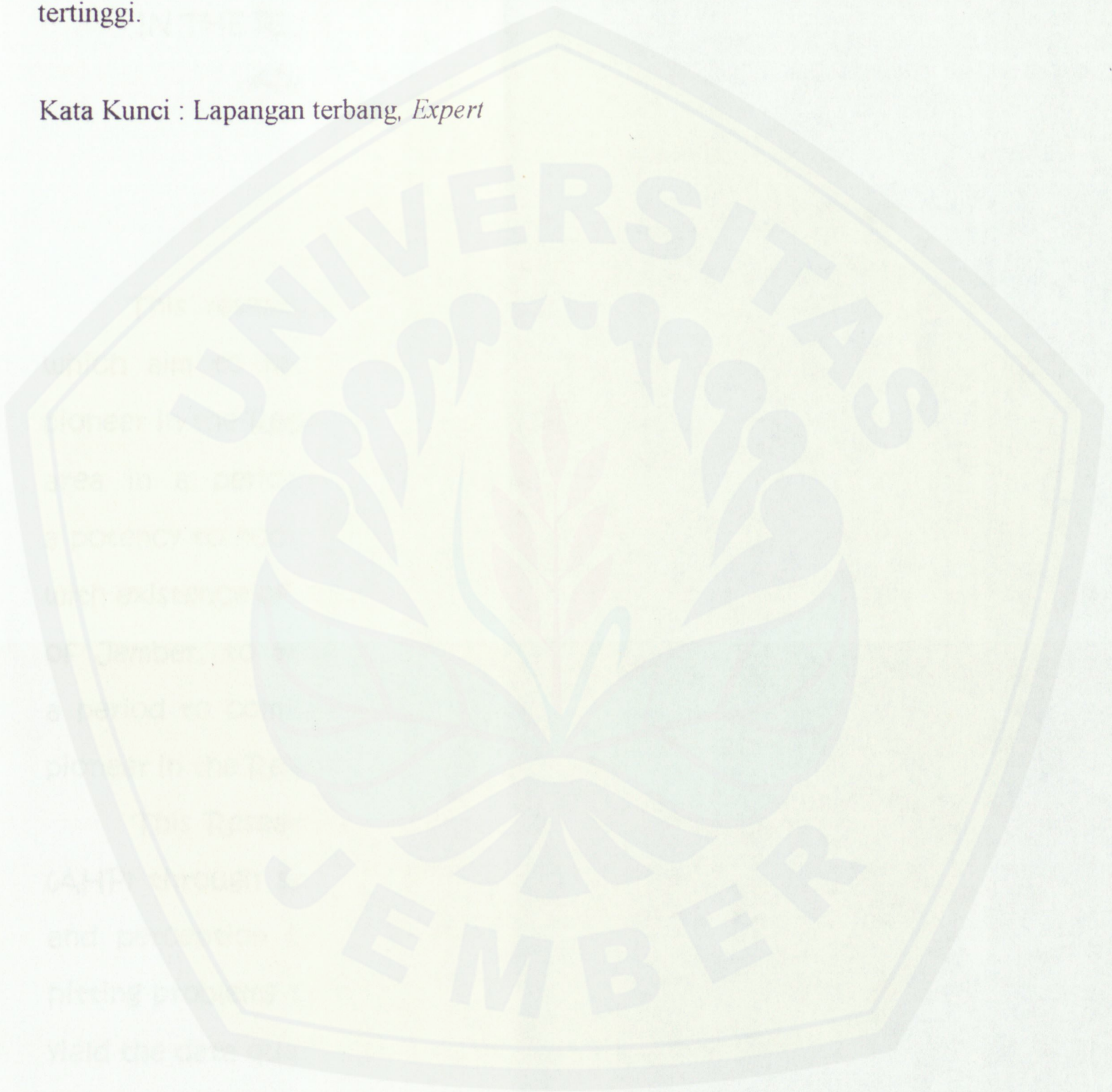
Penelitian ini bersifat *descriptive research* yang bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember terhadap pembangunan ekonomi daerah dimasa mendatang, untuk mengetahui sektor-sektor yang diharapkan mempunyai potensi terhadap pembangunan ekonomi daerah dimasa mendatang dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember, untuk mengetahui prioritas kebijakan Pemerintah daerah di masa mendatang dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) melalui penyebaran kuesioner dengan berusaha menangkap aspirasi dan persepsi masyarakat yang dianggap ahli atau *expert* dan pemegang kebijakan (*policy maker*) mengenai permasalahan yang diteliti. Kuesioner yang ditanggapi oleh responden akan menghasilkan data kualitatif yang dikuantisir.

Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini adalah pembangunan lapangan terbang perintis akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan dampak sosial maupun lainnya. Hal ini ditunjukkan dari nilai *eigen value* faktor ekonomi yang paling besar, dibanding kedua faktor lainnya. Sektor-sektor di bidang ekonomi, terutama pendapatan perkapita masyarakat dan PDRB serta kesempatan kerja, perdagangan, industri, pariwisata dan pemanfaatan lahan tidur. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor pendapatan per kapita masyarakat dan PDRB menjadi prioritas sektor yang berpotensi dan

paling diharapkan. Kebijakan pembangunan seimbang yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan adanya pembangunan lapangan terbang. Kebijakan tersebut didasari kriteria ekonomi, sosial dan lainnya, dimana hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan seimbang menjadi prioritas tertinggi.

Kata Kunci : Lapangan terbang, *Expert*



## SUMMARY

### PERCEPTION SOCIALIZE TO DEVELOPMENT OF PIONEER AIRFIELD IN THE REGENCY OF JEMBER WITH APPROACH ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

By

DELIANTI

This research have the character of descriptive research which aim to know the impact of development of airfield of pioneer in the Regency of Jember to economic development of the area in a period to coming, to know sector expected have a potency to economic development of area in a period to coming with existence of development of airfield of pioneer in the Regency of Jember, to know priority of policy of Local government in a period to coming with existence of development of airfield of pioneer in the Regency of Jember.

This Research use approach of Analytic Hierarchy Process (AHP) through spreading of questioners tiredly catch aspiration and perception of society assumed by expert and policy maker hitting problems checked. Questioners answered by responder will yield the data qualitative.

Result of analysis obtained from this research is development of airfield of pioneer will give economic impact of larger ones compared to by an other and social impact. This matter shown



from value of Eigen value factor of biggest economics, compared by second of factor of another sector in economic area, especially earnings of per capita socialize and PDRB and the opportunity work, commerce, industrial, tourism and exploiting of farm sleep. Result of analysis show that sector of earnings per capita socialize and PDRB become priority of sector that have the potency and most expected. Policy of well-balanced Development which must be done/conducted by local government of Regency of Jember to more improve growth of economy with existence of airfield development. The policy constituted by the economic criterion, social and other, where end result of this research indicate that policy of well-balanced development become highest priority.

Key word: Airfield, Expert

DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya .....	8
2.2 Landasan Teori .....	9
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Rancangan Penelitian .....	25
3.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data .....	25
3.3 Metode Analisis Data .....	26
3.4 Definisi Variabel Operasional .....	28

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

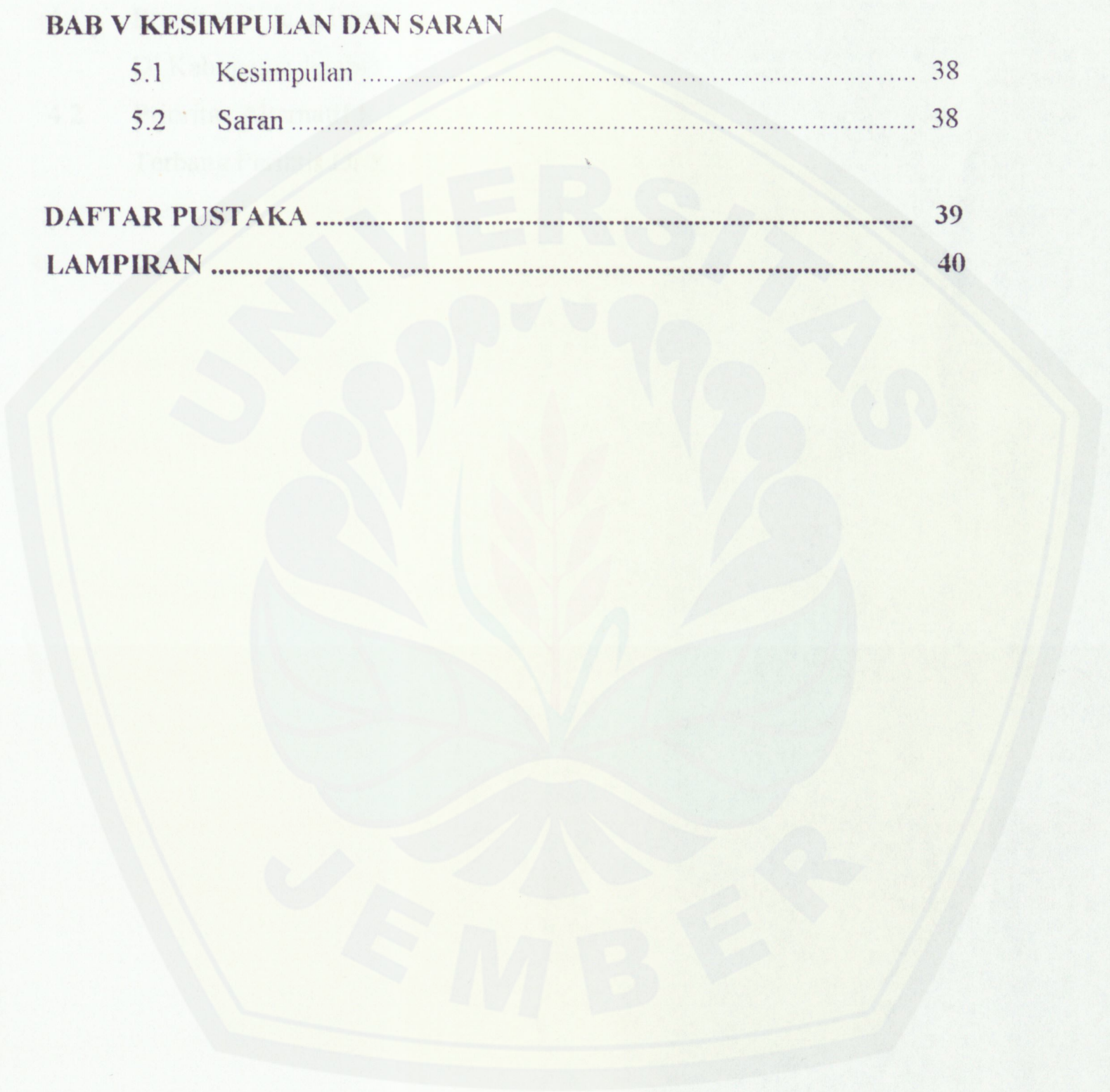
4.1	Gambaran Umum .....	29
4.2	Analisis Data .....	33
4.3	Pembahasan Hasil Perhitungan .....	36

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Kesimpulan .....	38
5.2	Saran .....	38

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>39</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>40</b>
-----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

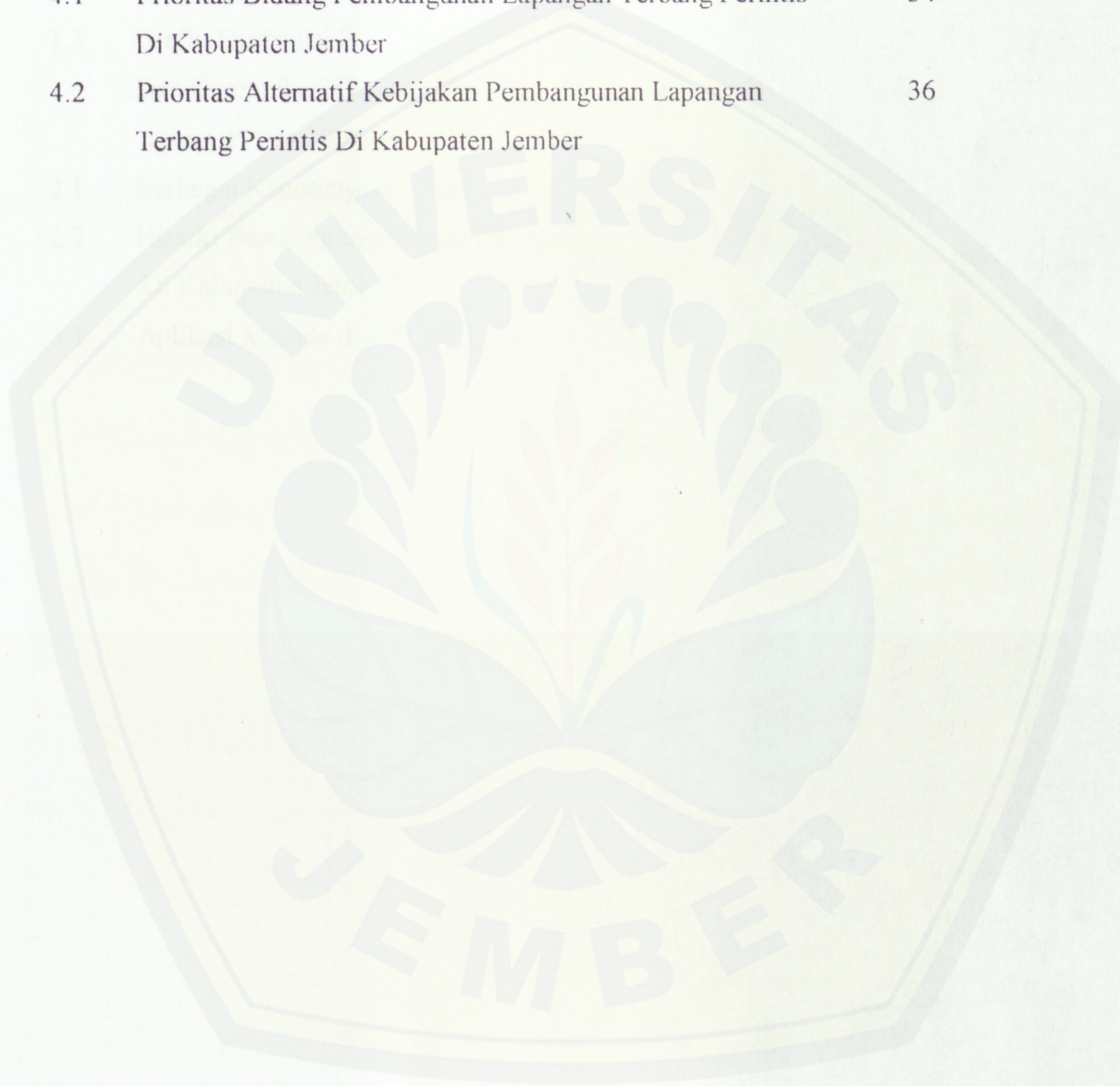
Daftar

Tabel		Halaman
2.1	Skala Preferensi <i>Analytic Hierarchy Process</i>	18
2.2	Indeks Random	21
4.1	Prioritas Bidang Pembangunan Lapangan Terbang Perintis Di Kabupaten Jember	34
4.2	Prioritas Alternatif Kebijakan Pembangunan Lapangan Terbang Perintis Di Kabupaten Jember	36

21

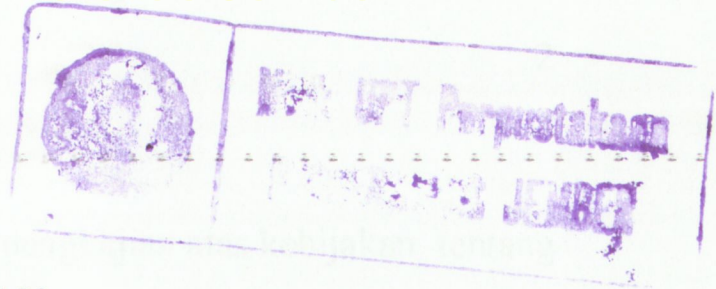
22

23



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Grafik Nilai PDRB Sektor Transportasi Dan Komunikasi, Tahun 1999 – 2002	4
1.2	Grafik Pertumbuhan Sektor Transportasi Dan Komunikasi Tahun 1999 - 2002	4
1.3	Grafik Distribusi Persentase PDRB Subsektor Transportasi Dan Komunikasi Berdasarkan Harga Konstan'93 Tahun 1999 - 2002	5
2.1	Berbagai Keuntungan <i>Analytic Hierarchy Process</i>	16
2.2	Hirarki Pembangunan Lapangan Terbang Perintis Di Kabupaten Jember	22
3.1	Aplikasi Metode <i>Analytic Hierarchy Process</i>	27



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Bagi suatu negara sedang berkembang pembangunan ekonomi merupakan instrumen utama dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi sebagai proses multidimensional meliputi perubahan organisasi dan orientasi seluruh sistem sosial dan ekonomi (Todaro, 1987:614). Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Perencanaan pembangunan merupakan upaya mengubah keadaan ekonomi esok suatu negara berkembang agar jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya (Sanusi, 2000:15). Ciri suatu perencanaan pembangunan bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan (*development objectives*) berkaitan dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*) (Bintoro, 1995:49). Tujuan pembangunan yaitu (a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (b) Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. (c) Meningkatkan kesempatan kerja. (d) Meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah. Dalam merealisasikan keberhasilan pembangunan nasional sangatlah ditentukan oleh pembangunan regional di wilayah nasional. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah seperti yang tertera dalam tujuan dan sasaran PROPENAS 2002-2004 yaitu pembangunan diarahkan untuk mendukung upaya pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dengan meningkatkan pembangunan daerah dan mempercepat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. (Kunarjo, 2002:24).

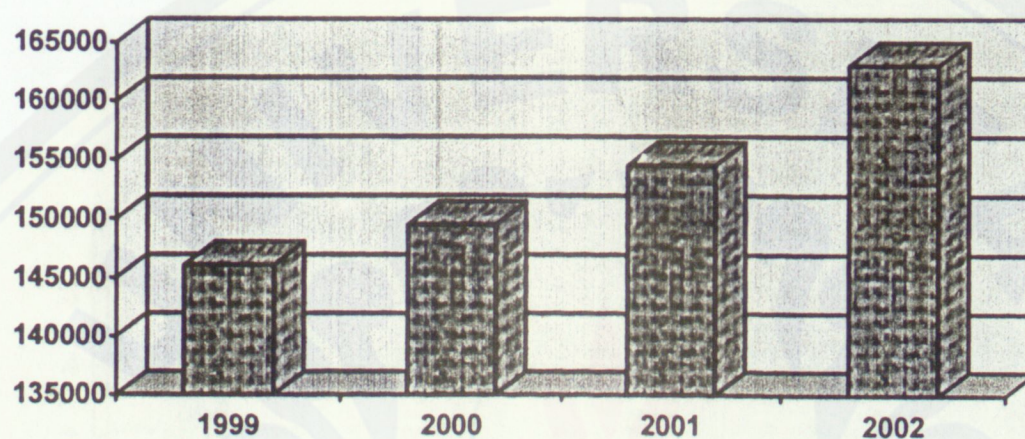
Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah bersama sektor swasta berupaya menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Arah kebijakan/tujuan pembangunan daerah adalah mengembangkan otonomi yang

6,85% pada tahun 2002. Pada tahun 2000 dan 2001 sektor ini mengalami sedikit penurunan.

Untuk lebih jelas melihat distribusi transportasi dan telekomunikasi tahun 1999 – 2002 dapat dilihat pada grafik nilai dan pertumbuhan sektor transportasi dibawah ini :

**Grafik 1.1**

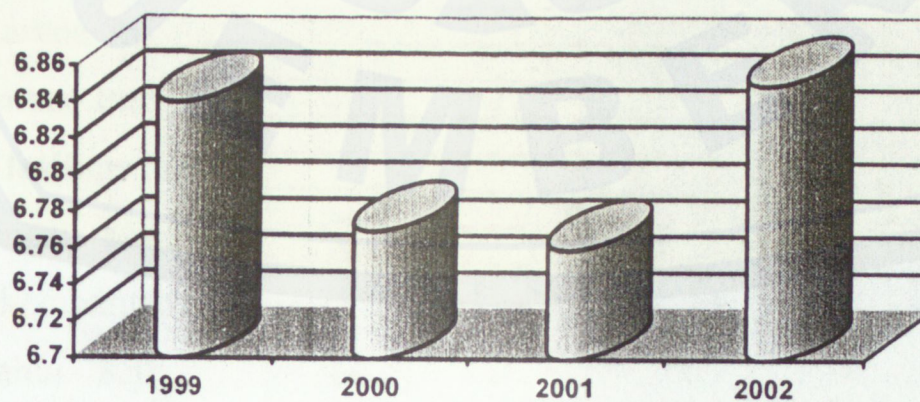
**Grafik Nilai PDRB sektor Transportasi dan Komunikasi  
Tahun 1999 – 2002**



Untuk melihat pertumbuhan sektor Transportasi dan Komunikasi dapat dilihat pada grafik Distribusi sektor Transportasi dan Komunikasi terhadap nilai PDRB di Kabupaten Jember:

**Grafik 1.2**

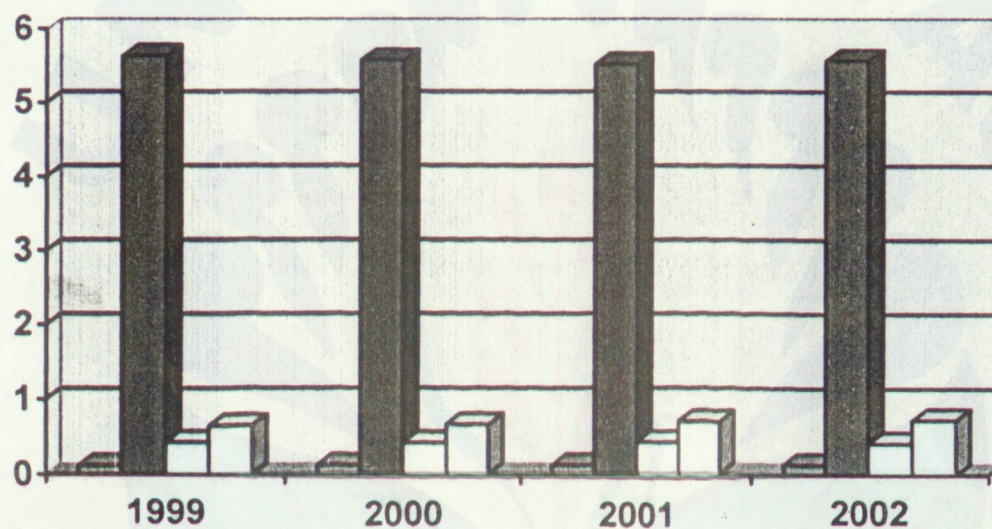
**Grafik Pertumbuhan sektor Transportasi dan Komunikasi  
Tahun 1999 – 2002**



Kontribusi terbesar dalam sumbangan terhadap PDRB didalam subsektor transportasi diberikan oleh Jasa Angkutan Jalan Raya yaitu sebesar 5,63% pada tahun 1999 dan sedikit mengalami penurunan menjadi 5,57% pada tahun 2002 (lampiran 2). Jasa Angkutan lainnya dan komunikasi masing-masing hanya memberi kontribusi kurang dari satu persen terhadap PDRB kabupaten Jember seperti terlihat pada tabel 1.2 dan grafik 1.3 dibawah ini:

**Grafik 1.3**

**Grafik Distribusi Persentase PDRB Subsektor Transportasi dan Komunikasi Berdasarkan Harga Konstan '93 Tahun 1999 - 2002**



Kabupaten Jember memiliki potensi keunggulan komperatif dan kompetitif dalam berbagai bidang dan sektor, kiprah kegiatan ekonomi akan semakin pesat jika ditunjang oleh tersedianya fasilitas sarana transportasi, baik darat maupun udara. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember merupakan kebutuhan yang tak dapat ditunda lagi. Melalui pembangunan fasilitas lapangan terbang perintis diharapkan bagi investasi, ekspor dan impor dengan segala multiplier efeknya akan dapat berlangsung. Pada gilirannya perkembangan ekonomi Kabupaten Jember akan dapat ditingkatkan. Seperti diketahui Kabupaten Jember dengan luas wilayah 2.537,64 km<sup>2</sup> berpenduduk hampir mencapai 2,3 juta jiwa tersebar di 32 wilayah kecamatan dengan 350 desa dan kelurahan, memiliki potensi ekonomi yaitu hasil-hasil sektor



pertanian dan perkebunan baik perkebunan milik pemerintah maupun swasta dan rakyat yang sangat melimpah, seperti kopi, coklat, tembakau. Komoditas ini merupakan sumber devisa yang amat penting. Di sektor pariwisata Jember kaya dengan obyek wisata alam dan wisata budaya.

Keberadaan Universitas Jember dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kabupaten Jember merupakan faktor pendorong utama pula perlunya fasilitas transportasi udara dimasa mendatang. Fasilitas transportasi udara bagi lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk memperlancar proses detase tenaga intelektual bagi pengembangan perguruan tinggi

Keputusan DPRD Kabupaten Jember No 1 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2001 tentang persetujuan pembangunan bandar udara di Kabupaten Jember, yang ditopang oleh PTPN XII untuk pembangunan lapangan terbang perintis merupakan bentuk "*Political Will*" yang tepat.

Lokasi pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember tersebut yang terletak di Desa Wirowongso kecamatan Ajung 20 km arah tenggara dari kota Jember. Lapangan terbang ini merupakan lapangan terbang perintis yang bersifat penyangga terhadap dua bandara internasional yaitu bandara Juanda di Surabaya dan bandara Ngurah Ray di Bali.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, masalah yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember terhadap pembangunan ekonomi daerah dimasa mendatang?
2. Sektor-sektor apakah yang diharapkan mempunyai potensi dimasa mendatang dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember?
3. Prioritas kebijakan apakah yang harus dilakukan pemerintah daerah dimasa mendatang dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember?

## **1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

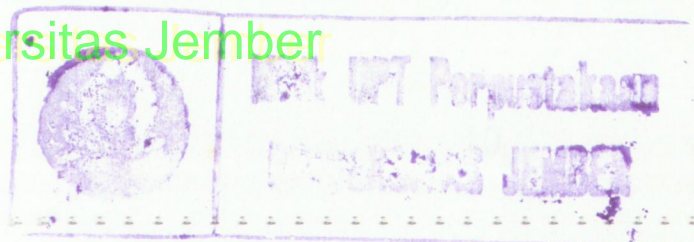
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dampak pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember terhadap pembangunan ekonomi daerah dimasa mendatang.
2. Untuk mengetahui Sektor-sektor yang diharapkan mempunyai potensi dimasa mendatang dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui prioritas kebijakan Pemerintah daerah dimasa mendatang dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Sumbangan informasi bagi pembuat kebijakan dan pengambil keputusan terutama yang berkaitan dengan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember.
2. Landasan untuk menemukan kebijakan pembangunan yang sesuai sehingga dapat merealisasikan pembangunan lapangan terbang di Kabupaten Jember.
3. Referensi bagi peneliti lain yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pembangunan lapangan terbang perintis dengan tempat maupun metode penelitian yang berbeda.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan hasil penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 14-20 April 1986 yang dimuat dalam *European Journal Of Operation Research* No. 47, Tahun 1990 dan diterjemahkan oleh Iwan Jaya Aziz tentang Studi Pasca Evaluasi Proyek Jalan Lintas-Sumatra (JLS) dengan Pendekatan *Analytic Hierarchy Process* dalam Kerangka Biaya dan Manfaat. Jalan Lintas Sumatra (JLS) akan membentang dari ujung selatan ke ujung utara pulau Sumatra untuk memudahkan arus barang maupun penumpang ke atau dari daerah pulau – pulau tersebut serta antara pulau Sumatra dan pulau Jawa yang sudah berkembang. studi pasca evaluasi, yang merupakan dasar penelitian ini, mencakup empat provinsi dibagian selatan pulau Sumatra yang dilalui JLS; Lampung, Sumatra Selatan dan Jambi.

Tujuan penelitian ini menggunakan aplikasi *Analytic Hierarchy Process* (AHP) adalah untuk menganalisa dampak menyeluruh sebuah jalan raya yaitu Jalan Lintas Sumatra terutama yang dirasakan oleh orang-orang yang berdiam di daerah yang dilalui oleh JLS menurut persepsi masyarakat setempat bukan persepsi peneliti atau beberapa pihak lain. Selain mempelajari persepsi masyarakat setempat mengenai dampak JLS juga mencari persepsi mereka mengenai pembangunan yang akan datang.

Kesimpulan yang diperoleh adalah (1). Dampak positif JLS yang dirasakan masyarakat setempat adalah lebih ditingkat nasional daripada regional (dengan bobot 0,750 Lampung, 0,830 Sum-Sel dan Bengkulu, 0,877 Jambi), yaitu mempermudah angkutan hasil perkebunan yang diperuntukan bagi pasar Internasional (ekspor) guna memperoleh pendapatan devisa. (2). Dampak negatif JLS yang dirasakan masyarakat setempat adalah lebih kuat ditingkat regional (dengan bobot 0,830 Lampung dan Sum-Sel, 0,670 Jambi, 0,752 Bengkulu) yaitu biaya sosial sebagai kemungkinan dampak negatif tertinggi karena ditandai dengan perubahan gaya hidup dan goyahnya nilai sosial (biaya modernisasi).

### 2.2.2 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan daerah (*Regional Development Planning*) dimaksudkan agar daerah dapat melaksanakan pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Manfaat perencanaan pembangunan regional adalah untuk pemerataan pembangunan atau perluasan dari pusat ke daerah (*spread effects*). Bila perencanaan pembangunan regional berkembang atas dasar kekuatan sendiri, maka kenaikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tidak terlalu tergantung pada pusat, tetapi cukup didorong dari daerah yang bersangkutan.

Perencanaan dalam pembangunan daerah harus menetapkan sasaran serta prioritas untuk mencapai yang ditentukan dalam rencana. Sasaran global dan sektoral satu dengan yang lainnya harus serasi dalam rangka mencapai laju pertumbuhan yang dibutuhkan dalam perekonomian. Hal ini membutuhkan penentuan prioritas atas dasar kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang perekonomian dengan memperhatikan sumber bahan baku, modal dan sumber daya manusia yang tersedia (Sanusi, 2000)

Pembangunan ekonomi regional adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dan wilayah tersebut. Adapun masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, sumber daya fisik dan sumber daya keuangan daerah (Arsyad, 1999:108).

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bias dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan

untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber swasta secara bertanggung jawab.

Tujuan pembangunan regional merupakan suatu kehendak masyarakat untuk mencapai keadaan tertentu atau menghindari terjadinya keadaan tertentu dimasa mendatang. Terbatasnya kemampuan suatu daerah untuk membangun menyebabkan daerah tersebut tidak dapat mengantasi semua masalah yang ada, seperti masalah sosial, ekonomi dan politik yang timbul akibat adanya pembangunan daerah yang tidak seimbang. Dengan demikian perlu dibuat skala prioritas dari tujuan pembangunan daerah untuk menentukan sampai dimana tujuan tersebut diciptakan dimasa mendatang (Sukirno, 1985:68)

### 2.2.3 Transportasi Sebagai Penunjang Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

**H Abbas salim (1993:6)** memberikan pengertian transportasi sebagai pemindahan bahan-bahan dan hasil-hasil produksi dengan menggunakan alat angkut dan mengangkut penumpang dari suatu tempat ketempat yang lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu: pemindahan/pergerakan (*movement*) dan secara fisik mengubah tempat dari barang/komoditi dan penumpang.

**H. M. N. Nasution (1996:11)** transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. dalam hal ini ada tiga hal yaitu (a) ada muatan yang diangkut, (b) tersedia kendaraan sebagai sarana angkutan, (c) ada jalanan yang dapat dilalui.

**Fidel (1997:2)** Transportasi adalah usaha pemindahan atau pergerakan sesuatu (orang atau barang) dari lokasi asal ke lokasi tujuan untuk keperluan tertentu dengan menggunakan alat tertentu.

Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, darimana kegiatan pengangkutan dimulai, ketempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Transportasi menyebabkan nilai suatu barang/komoditi lebih tinggi ditempat tujuan daripada ditempat asal. Nilai yang diberikan oleh transportasi berupa nilai tempat (*place utility*) dan nilai waktu (*time utility*) (Nasution, 1996:12).

dari tempat asal ke tempat tujuan dan hal ini merupakan suatu hal yang essential di dalam sistem distribusi maupun dapat memberikan arti bagi terciptanya manfaat tempat dan waktu (*time utility and place utility*) dimana memungkinkan pemindahan barang-barang dari satu tempat dimana barang tersebut kurang diperlukan ke tempat lain yang memerlukan serta memungkinkan mengadakan barang-barang tempat pada waktu diperlukan tempat tersebut (Kansil, 2001:12)

#### **2.2.4 Metode *Analytic Hierarchy Process* Salah Satu Alternatif dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah**

Dalam penentuan kebijakan pembangunan daerah, setiap *policy maker* dalam hal ini pejabat maupun anggota masyarakat sering dihadapkan pada kompleksnya permasalahan yang dihadapi sehingga memunculkan banyak pertimbangan dan alternatif dalam pengambilan keputusan. Permasalahan yang kompleks sulit untuk dipecahkan dengan analisis yang sederhana, apalagi permasalahan yang banyak yang tidak terstruktur. Banyaknya pertimbangan dalam penentuan kebijakan muncul dalam proses pengambilan keputusan dengan berbagai variabel yang diperhitungkan serta kompleksitas yang dihadapi. Sementara itu, alternatif kebijakan yang diambil tidak hanya satu atau dua saja melainkan meliputi sederetan kebijakan, sehingga sulit untuk menentukan prioritasnya bahkan terkadang kebijakan yang diambil bila dikaitkan satu sama lain menjadi kurang konsisten.

Hal ini ditambah lagi dengan kondisi informasi dan data yang masih diragukan keabsahannya. Dan juga karena pengalaman atau beberapa *policy maker* di daerah lebih baik daripada data dan bahkan sangat mewakili kondisi daerah, maka suatu alternatif metode untuk menangkap persepsi tersebut perlu dikembangkan. Dalam konteks inilah metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* merupakan salah satu alternatif. (Widi. 2002:30)

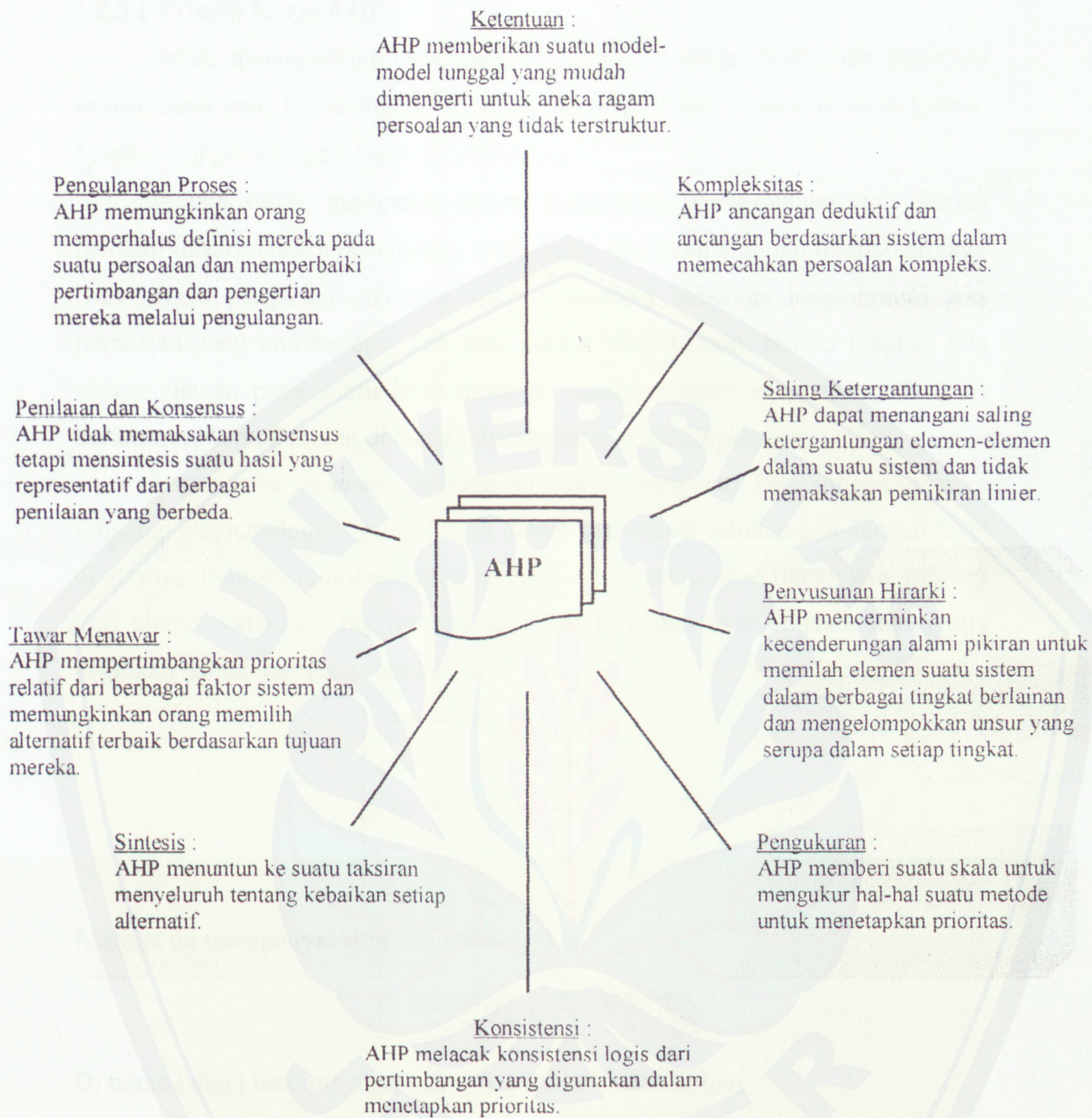
Metode AHP pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Prof. Thomas L. Saaty, seorang Guru Besar pada Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 1971 sampai 1975. Dalam bukunya "*An Eigenvalue Allocation model For Prioritization and Planning*" oleh *Energy manajement and*

*Policy Center*. Metode ini merupakan metode pengambilan keputusan dengan menggunakan peralatan utamanya yaitu sebuah hirarki. Dasar teori yang digunakan adalah teori pengukuran dan teori hirarki. Sedangkan metodologi yang dipakai berkisar penentuan urutan pentingnya sederetan kriteria dan pilihan kebijakan.

Data utama dari AHP adalah persepsi manusia yang dianggap ahli atau *expert*, artinya orang yang dianggap lebih mengerti benar dengan permasalahan yang dihadapi dalam suatu penelitian. Salah satu kemungkinan pendekatan AHP, khususnya pemakaian di tingkat daerah adalah pengendalian terhadap persepsi seseorang di daerah tersebut, terutama yang paling mengetahui suatu bidang tertentu yang dianalisis. Bidang yang dimaksud sangat terbatas pada kekhususan aparat daerah yang bersangkutan.

Pendekatan AHP bukan hanya besar manfaatnya bagi perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga dapat membantu mengambil keputusan di daerah untuk menentukan prioritas sederetan tujuan, skenario, masalah dan kebijakan. Bahkan suatu kasus konflik politik dan sosio-ekonomi juga dapat diselesaikan secara kompromi dengan menggunakan AHP. Selain itu, AHP mempunyai aplikasi data masalah, analisis sumber, analisis biaya manfaat (*cost – benefit*) maupun masalah interdependensi umum. Dengan demikian AHP dianggap sebagai suatu model yang berguna dan banyak yang menganggap kontroversial atau *multiobjective – multicriteria – multifactor decisions* (Harker dan Vagas, 1997:1383)

Diluar perspektif daerah, keuntungan lain penggunaan metode AHP oleh Saaty (1991,25) di jelaskan dalam gambar berikut :



**Gambar 2.1 : Berbagai Keuntungan Analytic Hierarchy Process**

Sumber : Saaty, 1991



	$A_1$	$A_2$	$A_3$	...	$A_n$
$A_1$	$W_1/W_1$	$W_1/W_2$	$W_1/W_3$	...	$W_1/W_n$
$A_2$	$W_1/W_1$	$W_1/W_2$	$W_1/W_3$	...	$W_1/W_n$
$A_3$	$W_1/W_1$	$W_1/W_2$	$W_1/W_3$	...	$W_1/W_n$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$A_n$	$W_1/W_1$	$W_1/W_2$	$W_1/W_3$	...	$W_1/W_n$

Matriks ini menunjukkan tingkat kepentingan setiap A terhadap A lainnya, yang diukur dengan skala ordinal. Untuk mengukur tingkat kepentingan tersebut, AHP mengusulkan skala seperti yang tercantum pada tabel 1, yang dimulai darisama-sama pentingnya (*equally preferred*) hingga mutlak pentingnya (*extremely preferred*). Penilaian atau judgement bisa dilakukan atas dua pernyataan yaitu: (1) Elemen mana yang lebih (penting, disukai, mungkin terjadi, ...). (2) Berapa kali lebih (penting, disukai, mungkin terjadi, ...)

**Tabel 2.1**  
**Skala Preferensi AHP**

Skala	Definisi	Keterangan
1	<u>Sama-sama</u> Diharapkan/penting	Kriteria A dan B <u>sama-sama</u> diharapkan / pentingnya
3	<u>Cukup sedikit</u> Diharapkan/penting	Kriteria A <u>cukup sedikit</u> diharapkan / penting dibandingkan Kriteria B
5	<u>Lebih</u> Diharapkan/penting	Kriteria A <u>lebih</u> diharapkan / penting dibandingkan Kriteria B
7	<u>Sangat</u> Diharapkan/penting	Kriteria A <u>Sangat</u> diharapkan / penting dibandingkan Kriteria B
9	<u>Mutlak</u> Diharapkan/penting	Kriteria A <u>Mutlak</u> diharapkan / penting dibandingkan Kriteria B
2,4,6,8	Nilai-nilai antara	Jika ragu-ragu dalam memilih skala, misalkan memilih sangat disukai atau mutlak disukai
Resiprokal	Jika A dibanding B adalah, katakanlah skala 7, maka B dibanding A adalah skala 1/7	Asumsi yang masuk akal

Sumber: Sulistyanti (2000)

Dengan skala 1-9, maka syarat tersebut dapat dipenuhi karena elemen terkecil adalah 1/9 dan terbesar adalah 9.

Sebenarnya banyak cara untuk menghitung prioritas setiap elemen dari matriks *pairwise comparison*. Cara yang termudah misalnya dengan menjumlahkan angka-angka dalam matriks tersebut menurut baris atau kolom, kemudian bobot setiap elemen ditentukan dengan membandingkan jumlah per baris atau kolom tadi dengan total penjumlahan baris atau kolom. Cara ini dianggap kurang tepat karena hanya mencerminkan jumlah elemen terhadap matriks secara keseluruhan dan tidak memperhatikan pengaruh suatu elemen terhadap matriks lainnya.

Cara yang paling baik dari segi keakuratan (untuk  $n = 4$ ) adalah:

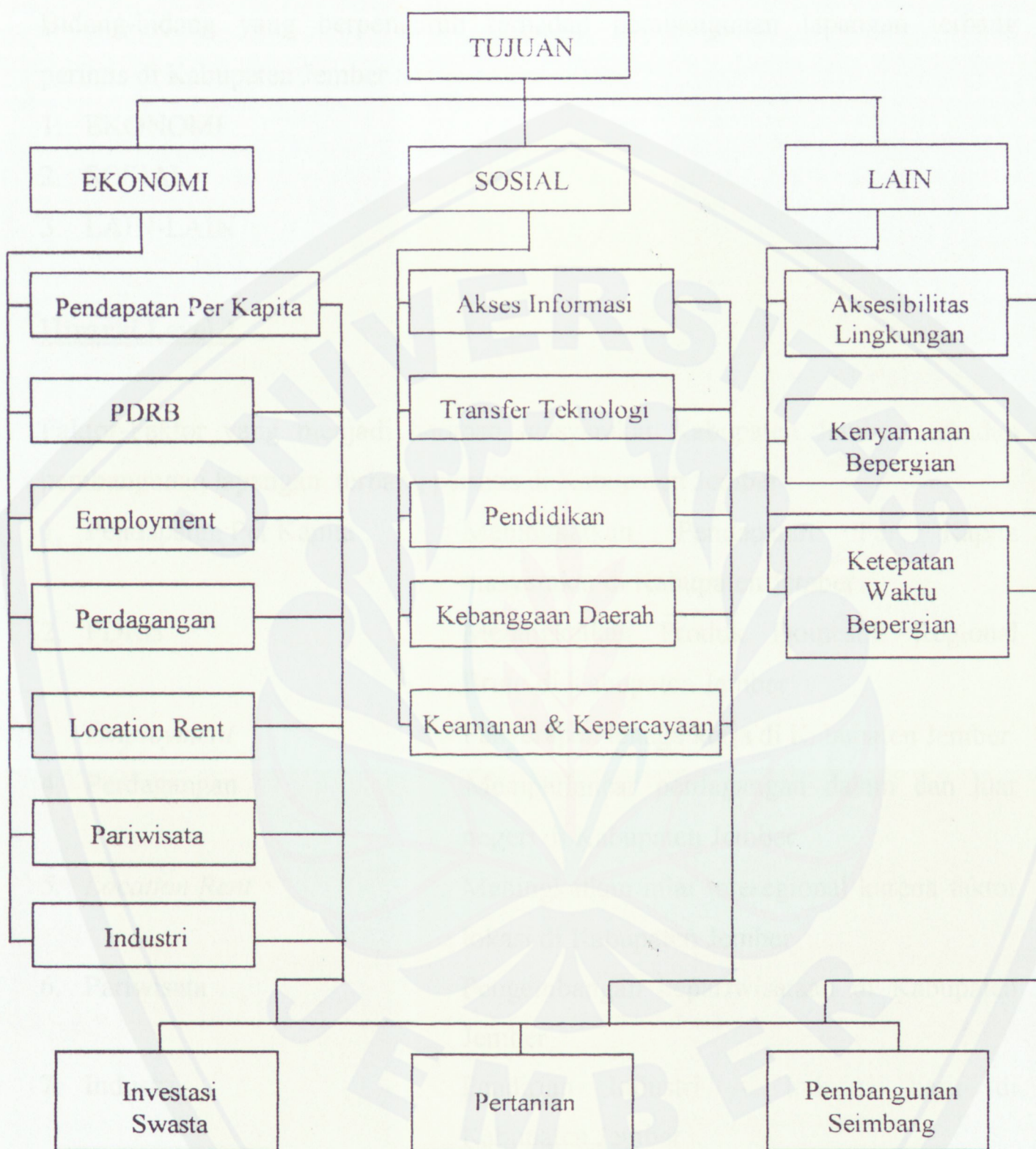
$$\begin{aligned} \sqrt[4]{\frac{w_1}{w_1} \times \frac{w_1}{w_2} \times \frac{w_1}{w_3} \times \frac{w_1}{w_4}} &= a \\ \sqrt[4]{\frac{w_2}{w_1} \times \frac{w_2}{w_2} \times \frac{w_2}{w_3} \times \frac{w_2}{w_4}} &= b \\ \sqrt[4]{\frac{w_3}{w_1} \times \frac{w_3}{w_2} \times \frac{w_3}{w_3} \times \frac{w_3}{w_4}} &= c \\ \sqrt[4]{\frac{w_4}{w_1} \times \frac{w_4}{w_2} \times \frac{w_4}{w_3} \times \frac{w_4}{w_4}} &= d \\ \hline &a + b + c + d \end{aligned}$$

Kemudian normalkan vektor (a, b, c, d) untuk mengetahui posisi relatif masing-masing elemen. Jika hirarki memiliki beberapa vektor prioritas (*local priority*), vektor-vektor tersebut dapat disintesis menjadi *global priority*. Proses sintesis ini dinamakan *priority setting*.

Perhitungan prioritas pada matriks *pairwise comparison* juga harus memperhatikan tingkat konsistensi, karena bagaimanapun juga inkonsistensi yang terlalu besar tidak dapat diterima dan bisa menjurus pada pengambilan keputusan yang salah. Metode AHP akan mengukur konsistensi penilaian yang dimulai dengan menghitung *consistency index* (CI), yakni

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

**HIRARKI**  
**PEMBANGUNAN LAPANGAN TERBANG PERINTIS**  
**DI KABUPATEN JEMBER**



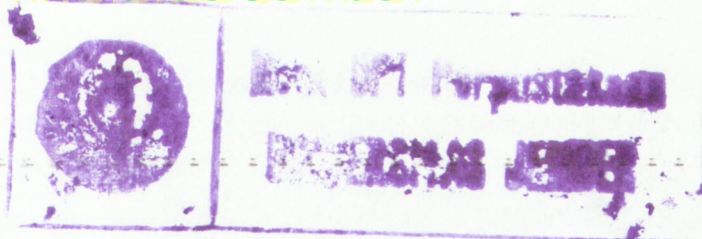
Gambar 2.2: Hiararki Pembangunan Lapangan Terbang Perintis

10. Pendidikan : Mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas Pendidikan yang ada di Kabupaten Jember
11. Kebanggaan daerah : Menjadi kebanggaan daerah Kabupaten Jember
12. Keamanan dan kepercayaan : Menjaga keamanan dan kepercayaan Kabupaten Jember
13. Aksesibilitas Lingkungan : Meningkatkan aksesibilitas lingkungan di Kabupaten Jember
14. Kenyaman berpergian : Rasa nyaman dalam berpergian
15. Ketepatan waktu berpergian : Ketepatan / kecepatan waktu yang ditempuh dalam perjalanan berpergian

### Hirarki Level 3

Alternatif Kebijakan yang dianggap penting terhadap pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember:

1. Investasi swasta : Kebijakan yang mendorong penanaman investasi swasta di Kabupaten Jember
2. Pertanian : Kebijakan yang mendorong aktivitas pertanian, termasuk Agroindustri di Kabupaten Jember
3. Pembangunan Seimbang : Kebijakan pada aktivitas sektoral, termasuk industri, pertambangan, perdagangan



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

#### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini bersifat *descriptive research*, yaitu membuat pencanderaan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu (Suryabrata, 2003;20).

Metodologi AHP merupakan penelitian deskriptif yang dikemukakan oleh Saaty (1996;20) bahwa:

*"The AHP is a descriptive theory. Therefore, it is not an automatic set up for accommodating any normative approach such as utility maximization. It needs to be interpreted and adapted for that purpose."*

#### 3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah persepsi orang atau sekelompok orang yang ahli atau *expert* dan dianggap lebih mengerti juga memahami mengenai perencanaan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember.

#### 3.1.3 Populasi

Populasi dalam Penelitian ini adalah pembuat keputusan atau *decision maker* yaitu tehnokrat, pemerintah, pengusaha, pengguna jasa (*user*) dan orang yang dianggap ahli atau *expert* serta mengetahui lebih banyak permasalahan tentang perencanaan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember.

### 3.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui:

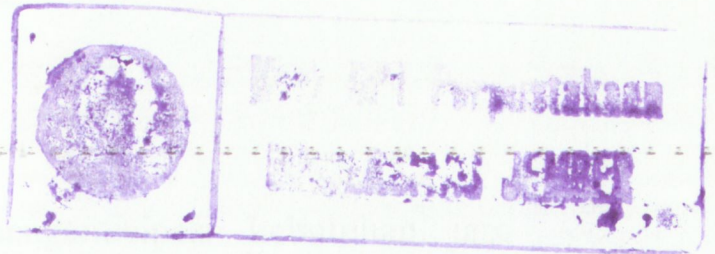
1. **Data primer**, diperoleh dari riset dilapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terlibat langsung dan ahli atau *expert*

### 3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran

Untuk memperoleh persepsi yang sama maka akan diberikan definisi variable operasional sebagai berikut:

- Lapangan terbang perintis adalah prasarana transportasi udara untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan pesawat terbang, dimana memiliki landasan pacu pendek.





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum

##### 4.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Jember memiliki luas sekitar 3.293.34 Km<sup>2</sup> terletak pada posisi 6°27'9" sampai dengan 7°14'33" bujur Timur sampai dengan 7°59'33" sampai dengan 8°33'56" Lintang Selatan. Berbentuk dataran Ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas utara dan serta Samudera Indonesia sepanjang batas selatan dengan pulau Nusa Barung yang merupakan satu – satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Batas administratif kabupaten Jember adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan sebagian kecil Kabupaten Probolinggo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.

Kabupaten Jember secara administratif terbagi menjadi 31 kecamatan dan 222 desa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Jember merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah rata-rata 83 meter diatas permukaan laut dan merupakan dataran rendah yang cukup subur dan cocok untuk mengembangkan komoditi pertanian dan perkebunan sehingga Kabupaten Jember dikenal sebagai penghasil devisa negara sektor perkebunan terbesar di Jawa Timur dengan komoditi andalan seperti kakao, karet, kopi, dan tembakau. Kabupaten Jember terbagi dalam beberapa kawasan yakni perkampungan, sawah, tegalan, kebun, campuran, perkebunan rakyat/swasta, tembakau, danau, tanah kritis dan hutan (BPS Kabupaten Jember, 1999)

##### 4.1.2 Deskripsi Pembangunan Lapangan Terbang Perintis

Kabupaten Jember merupakan daerah yang strategis karena dikelilingi oleh daerah tapal kuda yang potensial meliputi Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Banyuwangi. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat dan

d. Strength : Landasan dapat didarati pesawat gelatik, Pilatur, dan pesawat sejenis.

## 2. Overrun

a. Panjang dan lebar : Panjang dan lebar overrun, dapat dibangun dengan demention length dan width 60 m x 30 m

b. Surface : Tanah dan rumput

c. Arah Overrun : Timur – Barat atau Tenggara – Barat laut

## 3. Shoulders

a. Panjang dan Lebar : Panjang dan lebar shoulders, dapat dibangun dengan demention length width 1.120 m : 19 m sisi satu dan 15 m sisi yang lain.

b. Surface berupa : Tanah dan rumput.

## 4. Fasilitas Pendukung

### a. Fasilitas Navigasi dan Telekomunikasi

Untuk keseluruhan Navigasi perlu adanya fasilitas navigasi. Standart peralatan Navigasi udara, berdasarkan Non Directional Bencon (N.D.B) daya jangkau dan frekuensi diseduaikan dengan fasilitas Navigasi dan telekomunikasi yang ada disekitar lapangan terbang.

Untuk hubungan langsung antara satu lapangan terbang dengan lapangan terbang yang lain, serta hubungan lapangan terbang dengan pesawat udara yang bersangkutan diperlukan sarana komunikasi penerbangan

Single Side Bound merupakan standart peralatan komunikasi yang mempunyai nilai ekonomis dan prktis. Selain itu untuk keperluan komunikasi antara pesawat terbang dengan lapangan terbang standart peralatan pada tower UHF/Becker dengan daya jangkau yang telah ditentukan.



manusia, beberapa jenis komoditi andalan Jember juga dapat diangkut. Sedangkan Jasa terkait adalah kegiatan yang berkaitan secara tidak langsung dari jasa angkutan udara, seperti perhotelan, rumah makan, pelayanan angkutan kota khusus ataupun jasa pergudangan disekitar lokasi lapangan terbang perintis tersebut.

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Hasil Pengumpulan Data

Aplikasi metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) ini sedikit berbeda dengan metode penelitian survey pada umumnya. Proses adopsi pendapat responden dalam AHP tidak mensyaratkan jumlah minimum tertentu dari responden untuk mewakili suatu persepsi terhadap permasalahan, tetapi AHP hanya mensyaratkan responden-responden yang berkompeten serta mewakili pengetahuan yang konperhensif terhadap permasalahan yang diangkat dan secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan (Widi, 2005:51).

Berdasarkan identifikasi masalah dari responden yang terkait dengan masalah perencanaan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember, maka input data yang diambil berasal dari beberapa pihak, yaitu (1) Akademisi atau pakar dari beberapa Universitas di Kabupaten Jember dalam hal ini diwakili oleh Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, (2) Pemerintah Daerah kabupaten Jember dalam hal ini diwakili oleh badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Dinas Perhubungan, (3) DPRD Kabupaten Jember dalam hal ini diwakili oleh Komosi D, (4) *Non Government Organization* atau LSM, (5) Pengguna Jasa (*User*) transportasi udara.

Berbagai keterbatasan dan kendala serta sulitnya mencari responden yang memiliki standar kualifikasi dalam masalah ini, menyebabkan kuesioner yang berhasil disebar hanya 12 buah. Ahli atau pakar yang menjadi responden dalam penelitian ini dari keempat kelompok, yaitu akademisi dari Universitas Jember 3 responden, birokrat dalam hal ini pejabat Pemda Kabupaten Jember 4 orang, DPRD Kabupaten Jember 2 responden, dan NGO 3 responden.

#### 4.2.2 Hasil Perhitungan Data

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dan landasan teori yang digunakan sebagai alat untuk menjelaskan fenomena-fenomena empiris mengenai persepsi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember, maka dapat disajikan pemecahan kompleksitas permasalahan dalam bentuk hirarki dampak pembangunan lapangan terbang perintis di kabupaten Jember. Hirarki yang ada ditanggapi oleh para responden sehingga menghasilkan data yang kualitatif yang dikuantisir. Data yang diperoleh kemudian dijadikan matriks *pairwise comparison* untuk setiap kelompok responden. Setelah di rata-rata geometri, data tersebut diolah dengan program *expert choice* dengan tujuan ketepatan dan kecepatan sehingga diketahui prioritas lokal (*local priority*) setiap level dan prioritas global (*global priority*) untuk masing-masing kelompok responden maupun responden secara keseluruhan.

**Tabel 4.1 : Prioritas Bidang Pembangunan Lapangan Terbang Perintis**

Prioritas	Bidang	Sub Bidang	Bobot Nilai
<b>I</b>	<b>Ekonomi</b>		<b>0.718</b>
		Pendapatan per Kapita	0.295
		P D R B	0.113
		<i>Employment</i>	0.079
		Perdagangan	0.069
		Industri	0.064
		Pariwisata	0.061
		<i>Location Rent</i>	0.038
<b>II</b>	<b>Lain</b>		<b>0.151</b>
		Asesibilitas Lingkungan	0.103
		Ketepatan Waktu Berpergian	0.026
	Kenyamanan Berpergian	0.022	
<b>III</b>	<b>Sosial</b>		<b>0.131</b>
		Pendidikan	0.067
		Transfer Teknologi	0.026
		Akses Informasi	0.024
		Kebanggaan Daerah	0.008
	Keamanan dan Kepercayaan	0.006	

terbang perintis di Kabupaten Jember. Kebijakan yang paling di prioritaskan adalah kebijakan pembangunan seimbang, yaitu kebijakan aktivitas sektoral termasuk industri, perdagangan dan pertambangan dengan bobot nilai sebesar 0,418. Kebijakan kedua adalah kebijakan pertanian yaitu kebijakan yang mendorong aktivitas pertanian termasuk agroindustri dengan bobot nilai sebesar 0,348. Kebijakan terakhir adalah kebijakan investasi swasta yaitu kebijakan yang mendorong penanaman modal dengan bobot nilai sebesar 0,234. (Tabel 4.2)

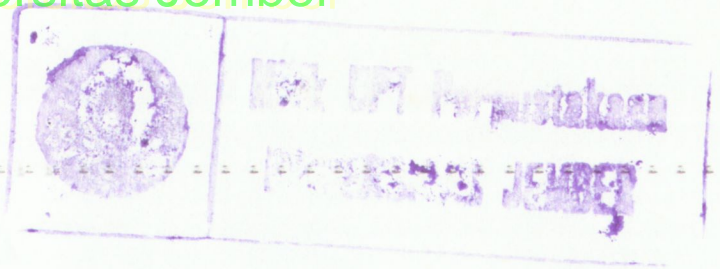
**Tabel 4.2 : Prioritas Alternatif Kebijakan Pembangunan Lapangan Terbang Perintis**

Prioritas	Kebijakan	Bobot Nilai
I	Pembangunan Seimbang	0.418
II	Pertanian	0.348
III	Investasi Swasta	0.234

#### 4.3 Pembahasan Hasil Perhitungan

Hasil sintesis hirarki mengenai dampak pembangunan lapangan terbang perintis di kabupaten jember menunjukkan bahwa Kabupaten Jember harus menitik beratkan pembangunan daerah pada kebijakan pembangunan seimbang. Hasil sintesis global menunjukkan bahwa bobot nilai yang diperoleh dari kebijakan pembangunan seimbang yaitu sebesar 0,418 mendapatkan prioritas tertinggi dibandingkan dua kebijakan yang lain.

Sesuai dengan teori pembangunan seimbang yang dikemukakan Rosestein-Rodan, pembangunan seimbang memerlukan tingkat investasi yang besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang dilakukan sebelum usaha pembangunan dilakukan, oleh karena itu strategi pembangunan seimbang disebut sebagai teori dorongan besar-besaran (*big push theory*). Tujuan utama dari kebijakan pembangunan seimbang adalah untuk menciptakan berbagai jenis industri yang berkaitan erat satu sama lain sehingga setiap industri akan memperoleh eksternalitas ekonomi sebagai akibat dari industrialisasi tersebut. Scytovsky mengartikan bahwa eksternalitas ekonomi merupakan jasa-jasa yang



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian persepsi masyarakat terhadap pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan dampak sosial maupun lainnya. Hal ini ditunjukkan dari nilai *eigen value* faktor ekonomi yang paling besar, dibanding kedua faktor lainnya.
2. Sektor-sektor di bidang ekonomi, terutama pendapatan perkapita masyarakat dan PDRB serta kesempatan kerja, perdagangan, industri, pariwisata dan pemanfaatan lahan tidur. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor pendapatan per kapita masyarakat dan PDRB menjadi prioritas sektor yang berpotensi dan paling diharapkan.
3. Kebijakan pembangunan seimbang yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan adanya pembangunan lapangan terbang. Kebijakan tersebut didasari kriteria ekonomi, sosial dan lainnya, dimana hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan seimbang menjadi prioritas tertinggi.

#### 5.2 Saran

Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menarik investor, dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan seimbang. Langkah yang perlu dilakukan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif yang mampu memberikan jaminan keamanan para investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Jember.

- Kansil, C. 2000. "Analisis Global Perencanaan Pembangunan "Airport" Dan Aspek Keterbatasan". *Jurnal Manajemen Transportasi*. Vol. 01 No:04. Jakarta: STMT Trisakti
- Kunarjo. 1991. *Perencanaan dan Program Pengendalian Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.
- Kustituantio B. Yansekardias. 2001. "Analytic Hierarchy Process (AHP): Sebuah Metode Pembobotan Alternatif Dalam Pembagian Dana Alokasi Umum (DAU). Studi Kasus Di Propinsi Yogyakarta". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol.16 No.3
- Miro, Fidel. 1997. *Sistem Transportasi Kota*. Bandung: Tarsito
- Mulyono, Sri. 1988. "AHP Suatu Metode Baru Yang Serbaguna". *EKI*. Vol. 36 No.3.
- Nasution, M. 1996. *Manajemen Pengangkutan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugraha, R.Aga. 2000. *Alternatif Prioritas Kebijakan Pembangunan Dalam pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 di Kabupaten Jember: penerapan Analytic Hierarchy Process*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.
- Pemda. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 1993/1994-2003/2004*. Jember
- Richardson, H. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Jakarta: LPFE-UI
- Saaty, Thomas. 1986. *Axomatic Fondation of The Anayitic Hierarchy Process*. *Management Science* Vol 32. No. 7

Todaro, M. 1987. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga

Zainuddin, R. 1996. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Study Kasus Propinsi Jambi*. Program Studi Ilmu Lingkungan universitas Indonesia. Disertasi. Tidak Dipublikasikan



## Lampiran 2

Tabel 1.2

Distribusi Persentase PDRB Subsektor Transportasi dan Komunikasi  
Berdasarkan Harga Konstan '93, Tahun 1999 – 2002

Angkutan Dan Komunikasi	1999 (Nilai)	1999 (%)	2000 (Nilai)	2000 (%)	2001 (Nilai)	2001 (%)	2002 (Nilai)	2002 (%)
Angkutan Rel	2.604,11	0,12	2.705,02	0,12	2.797,00	0,12	2.955,23	0,13
Angkutan Jalan Raya	120.381,50	5,63	122.899,89	5,57	126.167,61	5,52	132.605,93	5,57
Jasa Penunjang Angkutan	9.190,97	0,43	9.359,57	0,42	15.978,34	0,42	9.989,89	0,42
Komunikasi	13.900,96	0,65	14.530,21	0,66	9.572,95	0,70	17.439,73	0,73

Sumber : BPS PDRB Kabupaten Jember Tahun 1999 – 2002

## Lampiran 3

**Prioritas Dampak Pembangunan Lapangan Terbang Perintis  
Di Kabupaten Jember**

Prioritas	Level 1	Rataan	Level 2	Rataan	Level 3	Rataan
<b>I</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>0.718</b>			<b>Pembangunan Seimbang</b>	<b>0.418</b>
			Pendapatan per Kapita	0.295		
			P D R B	0.113		
			<i>Employment</i>	0.097		
			Perdagangan	0.069		
			Industri	0.064		
			Pariwisata	0.061		
			<i>Location Rent</i>	0.038		
<b>II</b>	<b>Lainnya</b>	<b>0.151</b>			<b>Pertanian</b>	<b>0.348</b>
			Asesibilitas Lingkungan	0.103		
			Ketepatan Waktu Berpergian	0.026		
			Kenyamanan Berpergian	0.022		
<b>III</b>	<b>Sosial</b>	<b>0.131</b>			<b>Investasi Swasta</b>	<b>0.234</b>
			Pendidikan	0.067		
			Transfer Tcknologi	0.026		
			Akses Informasi	0.024		
			Kebanggaan Daerah	0.008		
			Keamanan dan Kepercayaan	0.006		



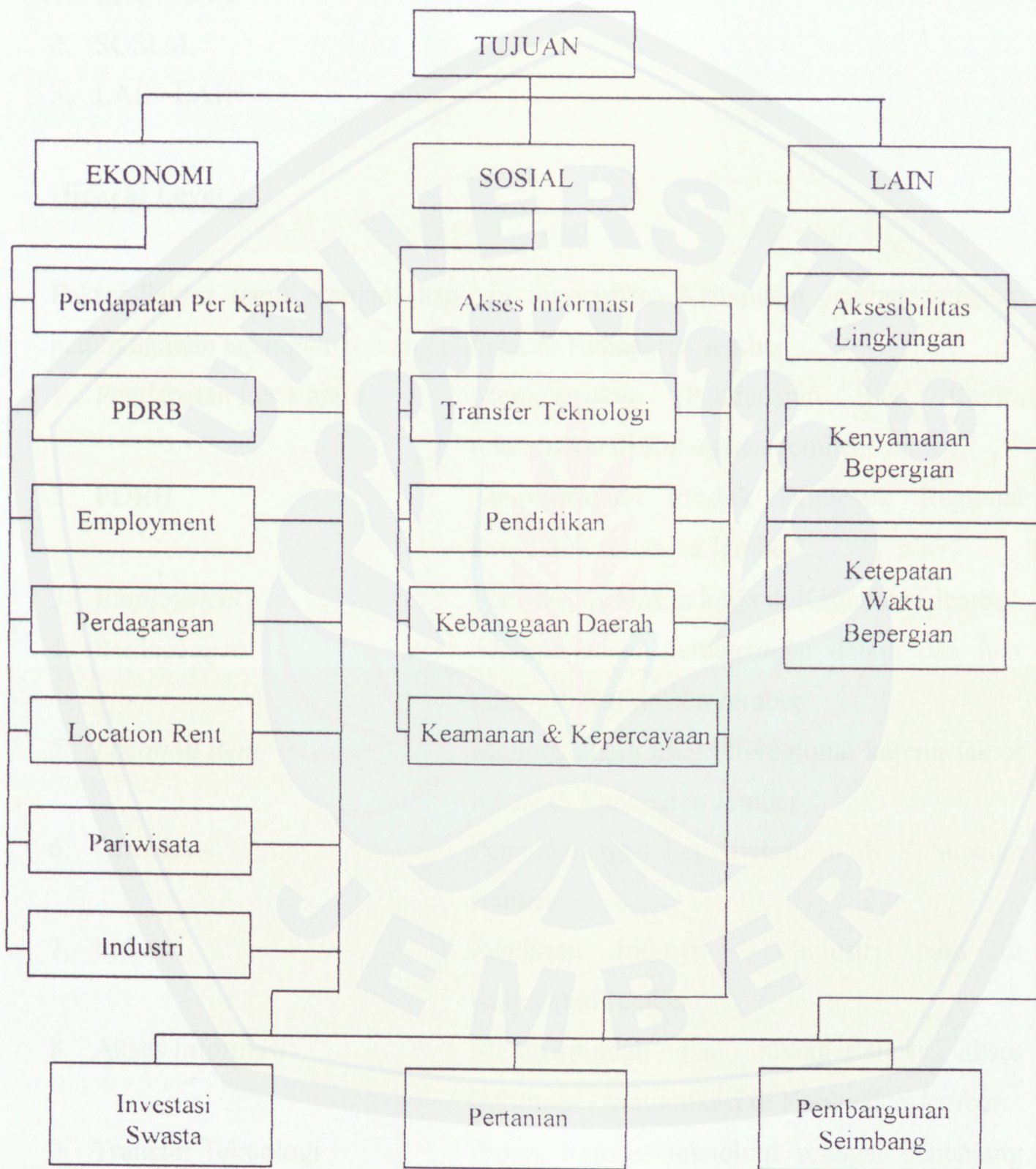
**PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER**

Metode *Analytic Hirarchy Process* (AHP) memiliki kuesioner yang berbeda dari metode penelitian lain. Kuesioner metode ini mencoba menangkap persepsi masyarakat yang di anggap ahli (*expert*) atau pemegang kebijakan (*policy maker*) dibidang atau permasalahan yang diteliti. Berikut ini adalah petunjuk pengisian kuesioner penelitian ini:

Bapak / Ibu hanya diminta untuk menjawab pertanyaan dengan cara **membandingkan secara berpasangan** setiap kriteria terhadap kriteria lain yang sehubungan dengan tujuan penelitian. Perbandingan antara dua elemen kriteria tersebut menggunakan skala preferensi (penilaian) sebagai berikut:

Skala	Definisi	Keterangan
1	<u>Sama-sama</u> Diharapkan / penting	Kriteria A dan B <u>sama-sama</u> Diharapkan / pentingnya
3	<u>Cukup sedikit</u> Diharapkan / penting	Kriteria A <u>cukup sedikit</u> Diharapkan / penting dibandingkan Kriteria B
5	<u>Lebih</u> Diharapkan / penting	Kriteria A <u>lebih</u> disukai Diharapkan / penting dibandingkan Kriteria B
7	<u>Sangat</u> Diharapkan / penting	Kriteria A <u>Sangat</u> Diharapkan / penting dibandingkan Kriteria B
9	<u>Mutlak</u> Diharapkan / penting	Kriteria A <u>Mutlak</u> Diharapkan / penting dibandingkan Kriteria B
2,4,6,8	Nilai-nilai antara	Jika ragu-ragu dalam memilih skala, misalkan memilih sangat Diharapkan atau mutlak disukai
Resiprokal	Jika A dibanding B adalah, katakanlah skala 7, maka B dibanding A adalah skala 1 / 7	Asumsi yang masuk akal

**HIRARKI**  
**PEMBANGUNAN LAPANGAN TERBANG PERINTIS**  
**DI KABUPATEN JEMBER**



10. Pendidikan : Mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas Pendidikan yang ada di Kabupaten Jember
11. Kebanggaan daerah : Menjadi kebanggaan daerah Kabupaten Jember
12. Keamanan dan kepercayaan : Menjaga keamanan dan kepercayaan Kabupaten Jember
13. Aksesibilitas Lingkungan : Meningkatkan aksesibilitas lingkungan di Kabupaten Jember
14. Kenyaman berpergian : Rasa nyaman dalam berpergian
15. Ketepatan waktu berpergian : Ketepatan / kecepatan waktu yang ditempuh dalam perjalanan berpergian

### Hirarki Level 3

Alternatif Kebijakan yang dianggap penting terhadap pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember:

1. Investasi swasta : Kebijakan yang mendorong penanaman investasi swasta di Kabupaten Jember
2. Pertanian : Kebijakan yang mendorong aktivitas pertanian, termasuk Agroindustri di Kabupaten Jember
3. Pembangunan Seimbang : Kebijakan pada aktivitas sektoral, termasuk industri, pertambangan, perdagangan

**B.6** Menurut Bapak / Ibu kebijakan pembangunan manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat **meningkatkan *location rent*** yang ada di Kabupaten Jember?

<b>Investasi Swasta</b>	<b>9 7 5 3 1 3 5 7 9</b>	<b>Pertanian</b>
<b>Investasi Swasta</b>	<b>9 7 5 3 1 3 5 7 9</b>	<b>Pembangunan Seimbang</b>
<b>Pertanian</b>	<b>9 7 5 3 1 3 5 7 9</b>	<b>Pembangunan Seimbang</b>

**B.7** Menurut Bapak / Ibu kebijakan pembangunan manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat **mengembangkan kepariwisataan** yang ada di Kabupaten Jember?

<b>Investasi Swasta</b>	<b>9 7 5 3 1 3 5 7 9</b>	<b>Pertanian</b>
<b>Investasi Swasta</b>	<b>9 7 5 3 1 3 5 7 9</b>	<b>Pembangunan Seimbang</b>
<b>Pertanian</b>	<b>9 7 5 3 1 3 5 7 9</b>	<b>Pembangunan Seimbang</b>

**B.8** Menurut Bapak / Ibu kebijakan pembangunan manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat **mendirikan industri – industri baru** di Kabupaten Jember?

<b>Investasi Swasta</b>	<b>9 7 5 3 1 3 5 7 9</b>	<b>Pertanian</b>
<b>Investasi Swasta</b>	<b>9 7 5 3 1 3 5 7 9</b>	<b>Pembangunan Seimbang</b>
<b>Pertanian</b>	<b>9 7 5 3 1 3 5 7 9</b>	<b>Pembangunan Seimbang</b>

**D.2** Menurut Bapak / Ibu kebijakan yang manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat mengaksisibilitas lingkungannya?

Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pertanian
Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang
Pertanian	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang

**D.3** Menurut Bapak / Ibu kebijakan yang manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember masyarakat dapat merasakan kenyamanan dalam berpergian?

Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pertanian
Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang
Pertanian	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang

**D.4** Menurut Bapak / Ibu kebijakan yang manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember masyarakat bisa mendapatkan ketepatan/kecepatan waktu dalam berpergian?

Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pertanian
Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang
Pertanian	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang

Nama Responden	
Jabatan	
Instansi	
Tanda Tangan	